



**PERJANJIAN KINERJA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU  
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : SUPRATMAN, SH**

**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI BENGKULU**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Dr. PETRUS R. GOLOSE**

**Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
BENGKULU**

Pihak Kedua,

**KEPALA**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

**SUPRATMAN, SH**

15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Rp.100.000.000  
Keprotokolan

Pihak Kedua,

**KEPALA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



**Dr. PETRUS R. GOLOSE**

Bogor, 07 Maret 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI  
BENGKULU**



**SUPRATMAN, SH**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BENGKULU**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	2 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,5 Indeks
6	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	15 Orang
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi	5 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi	4 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,2 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	20 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 Indeks
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	2 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	2 Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.231.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.319.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.647.860.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.105.200.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.247.963.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.846.979.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.74.050.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.50.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	Rp.1.000.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.192.845.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.4.639.011.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.87.452.000
13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.118.726.000
14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.5.168.475.000